

BAB V

KESIMPULAN

Didalam ilmu hubungan internasional mempelajari tentang Organisasi dan Administrasi Internasional, dan Uni Eropa termasuk satu-satunya organisasi regional terbesar dan termaju saat ini dan memiliki peran kebijakan Luar Negeri untuk memelihara perdamaian dan memperkuat keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB yakni mendorong kerjasama internasional; dan mengembangkan serta mengkonsolidasikan demokrasi dan supremasi hukum serta penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar. Dan Uni Eropa memiliki struktur yang hampr sama dengan struktur sebuah Negara, sehingga Uni Eropa mampu mengeluarkan atau menjatuhkan sanksi terhadap Negara yang bukan anggotanya. Seperti pada penelitian ini, sanksi yang diberikan Uni Eropa terhadap Myanmar dikarenakan terjadinya pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan pemerintahan Myanmar terhadap HAM dan demokrasi.

Uni Eropa menggunakan sifat *confrontation strategy*, dimana Uni Eropa mencoba untuk mempertajam isu-isu yang mengandung konflik kepentingan dengan Myanmar, dan memaksa Myanmar untuk memodifikasi posisinya melalui pengakuan terhadap superioritas kapabilitas Uni Eropa. Di lain pihak, dengan adanya pengakuan Myanmar terhadap superirotas kapabilitas Uni Eropa, maka diharapkan Myanmar akan mencoba untuk membuat strategi penyesuaian-penyesuaian (*accommodation strategy*)

Sehingga dewasa ini pemerintah Myanmar gencar melakukan perubahan perubahan signifikan dengan lebih memperhatikan kepentingan-kepentingan HAM dan demokrasi, dengan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Myanmar, pada akhirnya Uni Eropa melonggarkan sanksinya dengan menanggihkan sanksi ekonominya terhadap Myanmar, walaupun Uni Eropa masih menunggu kebijakan-kebijakan positif lainnya dari pemerintahan Myanmar, mengingat masih adanya konflik yang belum tertangani oleh pemerintah Myanmar, dan hingga kini Uni Eropa masih menunggu dan berharap kemajuan-kemajuan bagi pemerintah Myanmar, agar dapat terjalin kerjasama-kerjasama yang membangun demokrasi dan kemakmuran bagi kedua belah pihak. Uni Eropa demi mendukung perubahan Myanmar menuju Demokrasi menanggihkan sebagian besar sanksinya terhadap Myanmar, salah satunya sanksi ekonomi pada tahun 2012, ini menunjukkan sikap Uni Eropa dalam dukungannya terhadap demokrasi dan juga HAM